

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada Triwulan III 2022, Provinsi NTT mengalami inflasi sebesar 6,97% (yoy), setelah Triwulan sebelumnya mengalami inflasi sebesar 4,28% (yoy). Inflasi terutama disebabkan oleh kenaikan bensin dan angkutan dalam kota sebagai dampak dari penyesuaian harga BBM, serta kenaikan harga sawi hijau dan beberapa komoditas ikan seperti ikan tembang dan ikan cakalang. Di sisi lain, penurunan harga tomat, bawang merah, ikan tongkol, cabai rawit dan cabai merah menjadi faktor penahan inflasi. Secara tahunan, inflasi *year-on-year* pada bulan September 2022 tercatat sebesar 6,97% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Nasional sebesar 5,95% (yoy).

Berdasarkan asesmen kondisi terkini, **tekanan inflasi terjadi seiring harga BBM yang telah ditetapkan per tanggal 3 September 2022 dan berpotensi mendorong kenaikan harga** baik dampak secara langsung melalui kelompok *administered prices* maupun dampak secara tidak langsung terhadap kelompok *core inflation* dan *volatile food*. Periode puncak panen hortikultura yang telah berlalu di bulan Agustus hingga September juga berpotensi mendorong kenaikan harga komoditas tersebut. Adapun tarif angkutan udara berpotensi menurun seiring dengan harga avtur pada periode 1-14 Oktober yang lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya.

Sementara itu, inflasi di Kabupaten Malaka mengikuti perkembangan inflasi di Kota IHK terdekat yaitu Kabupaten Sikka Kota Maumere. Kota Maumere mengalami inflasi sebesar 5,95% (yoy), setelah triwulan sebelumnya mengalami inflasi sebesar 5,42% (yoy). Inflasi Kota Maumere terutama bersumber dari kenaikan harga bensin, sawi hijau, angkutan udara, angkutan dalam kota, dan ikan kakap merah. Meskipun begitu, keyakinan konsumen di Provinsi NTT cenderung meningkat, sehingga menjadi faktor pendorong inflasi. Indeks keyakinan konsumen (IKK) pada Triwulan III 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode sebelumnya dan tetap berada pada level optimis. Hal ini menjadi indikasi bahwa tingkat konsumsi masyarakat cenderung meningkat, terutama didorong oleh perkembangan kasus COVID-19 di NTT yang semakin terkendali.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.
 1. Rendahnya konektivitas jaringan distribusi pangan. Rendahnya konektivitas yang dimaksud adalah permasalahan konektivitas terutama dihadapi oleh daerah-daerah Timor yang memiliki tingkat ketergantungan pasokan antar daerah yang cukup tinggi.
 2. Kesenjangan informasi. Kesenjangan informasi atau *asymmetric information* antar pelaku di tengah panjangnya rantai distribusi menyebabkan tidak efisiennya harga di pasar.
 3. Distorsi struktur pasar. Distorsi struktur pasar ditimbulkan akibat adanya beberapa komoditas strategis yang terdistorsi menyebabkan adanya kekakuan dalam perilaku pembentukan harga
 4. Produktivitas pangan. Kondisi iklim dan cuaca yang cenderung panas hampir di seluruh daerah di Provinsi NTT menjadikan lahan di Provinsi NTT bersifat kering dan tandus, sehingga sangat mempengaruhi kesuburan tanah dan produktivitas pangan.
3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka menjaga pasokan dan harga yang terjangkau bagi masyarakat, serta menjaga aksesibilitas pangan bagi masyarakat sehingga tidak terjadi penurunan kesejahteraan masyarakat, maka kami sampaikan beberapa rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh setiap Kabupaten di Pulau Flores:

1. Semua Kabupaten di Pulau Flores harus melakukan Quick Wins (Program Pengendalian Inflasi Dalam Jangka Pendek) sebagai berikut:
 - a. Wajib mengintensifkan kegiatan operasi pasar (memastikan ketersediaan pasokan di pasar, kegiatan pasar murah, sidak pasar, pemantauan harga baik di pasar maupun ke gudang distributor) sampai akhir tahun 2022.
 - b. Memperkuat dan melaksanakan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), salah satunya dapat dilakukan dengan memanfaatkan BUMD, terutama untuk komoditi yang mempunyai andil besar terhadap inflasi di Provinsi NTT, seperti bawang merah, cabai merah, cabai rawit, dll.
 - c. Pemanfaatan platform perdagangan digital untuk memperlancar distribusi dari setiap daerah
 - d. Melakukan mapping (Pemetaan) produksi dan distribusi komoditas di daerah, khususnya komoditas hortikultura.
 - e. Membuat, merapikan, dan melakukan pengkinian database distributor (pemasok) komoditas hortikultura di setiap daerah.
 - f. Menyusun neraca komoditas pangan strategis oleh seluruh pemerintah daerah di Kabupaten
 - g. Menggalakkan komunikasi penggunaan produk olahan. Seperti, penggunaan minyak kelapa sebagai substitusi minyak sawit, penggunaan bubuk cabai, penggunaan gula lempeng, gula semut, gula aer (Rote), gula hela, dll. guna meningkatkan konsumsi terhadap produk lokal dan mengurangi impor dari luar daerah.
 - h. Berupaya memberikan subsidi biaya angkut komoditas hortikultura guna menurunkan biaya logistik (pengiriman komoditas).
 - i. Meningkatkan produksi komoditas hortikultura dengan membentuk Kampung Sadar Inflasi (Gerakan Menanam Cabai dan Sayuran di Pekarangan Rumah) untuk setiap daerah di Pulau Flores, seperti kampung sadar inflasi yang telah launching di Kelurahan Kayu Putih, Kota Kupang. Program tersebut bertujuan untuk meminimalisir laju inflasi yang semakin tinggi, terutama untuk komoditas hortikultura.
 - j. Mengoptimalkan penggunaan alokasi anggaran APBD khususnya belanja tidak terduga dalam rangka pengendalian inflasi di daerah antara lain menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan, ketersediaan bahan pangan terutama dengan kerja sama antar daerah serta memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi.
2. Seluruh Kabupaten di Pulau Flores harus membentuk Tim Teknis Pengendalian Inflasi Daerah yang bertugas untuk memastikan bahwa action plan yang telah direncanakan dijalankan sesuai dengan kesepakatan bersama.
3. Semua Kabupaten di Pulau Flores harus melakukan Program Pengendalian Inflasi Dalam Jangka Menengah dan Panjang sebagai berikut:
 - a. Memastikan ketersediaan data sektoral yang dapat diakses secara online melalui website masing-masing Kabupaten. Untuk dapat merumuskan strategi pembangunan yang tepat dan komprehensif, diperlukan data yang lengkap, akurat, kini dan utuh (LAKU)
 - b. Membentuk klaster komoditas ketahanan pangan yang kuat guna mengurangi ketergantungan terhadap komoditas dari luar daerah.
 - c. Membentuk Closed Loop (Mode Kemitraan Agribisnis) Program di setiap Kabupaten guna

menciptakan ekosistem komoditas yang kuat.

- d. Membuat dan membentuk Cold Storage di setiap Kabupaten di Pulau Flores guna menjamin ketersediaan stok komoditas.
- e. Pembangunan pabrik pakan ternak dan penyediaan pakan ternak untuk mendukung stabilisasi produksi daging ayam ras, telur ayam, dan daging babi.
- f. Pembangunan dan Pengembangan Food Estate untuk mendorong ketahanan pangan komoditas strategis berbasis korporatisasi pertanian.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam program yang telah dituliskan dalam peta jalan pengendalian inflasi di daerah, sebagai evaluasi atas kebijakan yang telah ditetapkan, Pemerintah Provinsi NTT secara rutin setiap bulannya melaksanakan kegiatan Rapat Teknis dan Rapat Koordinasi TPID, serta melaksanakan kegiatan *High Level Meeting* Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM TPID) Provinsi NTT setiap triwulannya serta melaksanakan tindak lanjut atas rapat HLM TPID yang telah dilakukan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Optimalisasi TTIC sebagai pusat distribusi bahan pangan pokok yang didukung dengan .
2. Melaksanakan Program pengendalian inflasi berbasis masyarakat;
3. Publikasi harga data komoditas pokok secara periodik di media massa atau media lain yang mudah diakses masyarakat.
4. Pembentukan *database* surplus / defisit komoditas pangan strategis (Cabai dan Bawang Merah).
5. Melakukan pengumpulan Data Pengolahan Informasi Pasar (PIP) Komoditi Peternakan
6. Pelatihan warga dibidang teknologi, pertanian organik, dan usaha tani.
7. Pendampingan bagi kelompok tani dibidang penerapan pertanian organik berbasis teknologi dan manajerial kelembagaan.
8. Program lahan percontohan yang dikelola oleh gabungan kelompok tani (Gapoktan) dan dibimbing langsung oleh petugas penyuluh lapang (PPL) berbasis teknologi dan pertanian organik.
9. Pengembangan unit pengolahan pupuk dan pestisida organik.
10. pengembangan unit pengolahan pasca panen padi organik sehingga dapat meningkatkan nilai jual ke wilayah lain.
11. pengembangan koperasi unit desa (KUD).
12. kebijakan penerapan pertanian organik kepada masyarakat dan keikutsertaan menjadi anggota koperasi unit desa (KUD).
13. menjalin kemitraan dengan pihak swasta untuk meningkatkan kesempatan menembus pasar ke wilayah lain.
14. Melaksanakan pemantauan harga komoditas bahan pokok
15. melaksanakan program sidak pasar dan pasar murah
16. Melaksanakan optimalisasi kegiatan dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras medium (KPSH).
17. Mengakselerasi pemulihan sektor pertanian dan peternakan dengan membentuk klaster komoditas yang sering mendorong inflasi seperti klaster bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit.
18. Pengadaan kapal penangkap ikan kapasitas besar dan alat bantu penangkapan

ikan/pukat dan penguatan kelembagaan dan keterampilan nelayan dalam rangka menekan biaya produksi ikan.

19. Menjamin kelancaran distribusi melalui perbaikan akses (jalan, jembatan, pelabuhan) antar kabupaten/ kota.
20. Pemanfaatan tol laut.
21. Melaksanakan Program pengendalian inflasi berbasis masyarakat;
22. Publikasi harga data komoditas pokok secara periodik di media massa atau media lain yang mudah diakses masyarakat